

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Rachmawati A. Rifai**

*rachmawatiarifai@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## Abstract

*The purposes of this study are: 1) to capture the development of regional revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and profit sharing funds on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi; 2) to determine and analyze the simultaneous influence of regional revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and profit sharing funds on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi; 3) to determine and analyze the partial influence of regional revenue, general allocation funds; specific allocation funds, and profit sharing funds on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi. The method of research is descriptive verification with multiple regressions analysis. Sample in this study involves all districts and cities in Central Sulawesi with a period of study for four years, from 2010-2014. The results show that the contribution of regional revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and profit sharing funds on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi is 44.6%; 55.4% is influenced by other variables. Simultaneously, regional revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and profit sharing funds have significant influence on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi. Partially, specific allocation funds as significant influence on capital, while regional revenue, general allocation funds, and profit sharing funds have insignificant influence on capital expenditure at the district/city governments in Central Sulawesi.*

**Keywords:** *Regional Revenue, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, Profit Sharing Funds, and Capital Expenditure*

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Subaygo (2003) menyatakan bahwa keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 01 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan

serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi daerah didukung adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lahirnya undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam

merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Melalui otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya. Ini merupakan tantangan bagi daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh (Pratiwi, 2007).

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan

pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah (Halim, 2009).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Puspita Sari, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan

publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Melalui otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan

dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja

daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Penyerapan anggaran tahun 2014 masih di bawah 90%, berarti ada permasalahan dalam belanja modal (Viva News, 2015).

Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain itu, keterlibatan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) bekerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perlu diperluas dan ditingkatkan. Bila penyediaan infrastruktur tidak diperluas dan ditingkatkan, maka ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6%-7% dewasa ini, dengan peluang investasi yang amat besar, tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

Selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai jumlah pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD

sehingga mengakibatkan alokasi untuk belanja modal berkurang. Melihat pada kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi yang kurang diperhatikan, maka pemerintah daerah sudah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, dimana sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam dan ilmiah terhadap masalah pendapatan daerah (PAD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil) serta Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka jenis penelitian ini adalah verifikatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 13 (tiga belas) daerah dan dari 13 (tiga belas) daerah yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel disebabkan karena tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap pada

kurun waktu penelitian (tahun 2010-2014), sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan 11 (sebelas) daerah sebagai sampel penelitian karena kesebelas daerah tersebut memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan yang lengkap pada kurun waktu penelitian tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Keseluruhan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Daerah-daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian (tahun 2010-2014) dan dari 13 (tiga belas) daerah yang ada hanya terdapat sebanyak 11 (sebelas) daerah yang memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan lengkap selama kurun waktu penelitian.

Pada konteks penelitian ini, penulis membagi variabel *independen*/bebas (variabel X) kedalam 4 (empat) variabel dan satu variabel *dependen*/terikat (variabel Y). Variabel *independen* (bebas) dalam penelitian ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) serta variabel *dependen* (terikat) yaitu Belanja Modal (Y) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan diukur dengan menggunakan skala rasio dan dengan operasionalisasi variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), adalah merupakan sumber keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dari untuk periode tahun penelitian 2011-2015 yang digali dari dalam wilayah daerah dan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Belanja Modal (Y) adalah merupakan belanja langsung yang dikeluarkann oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun penelitian 2011-2015 untuk membiayai kegiatan investasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka penulis menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) karena dapat mengukur pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*). Menurut Setiaji, 2004 dalam Idhamsya, (2011:49) model regresi linier berganda dapat dirumuskan:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Dimana:

Y = Variabel tak bebas (*dependen* variabel)

$b_0$  = Konstanta (*intercep*)

$X_1, X_2, \dots, X_n$  = Variabel bebas (*independen* variabel)

$b_1, b_2, \dots, b_n$  = Besaran yang akan diduga (koefisien regresi)  
 $e$  = Kesalahan pengganggu (*error*)

Jika persamaan diatas dimasukkan dalam penelitian ini maka rumusnya adalah:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

$Y$  = Belanja Modal

$b_0$  = Konstanta (*intercep*)

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus

$X_4$  = Dana Bagi Hasil

$e$  = Kesalahan Pengganggu (*error*)

Uji ketepatan perkiraan ( $R^2$ ) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi. Uji ini dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinan  $R^2$ , jika nilai  $R^2$  semakin besar atau mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat (Setiaji, 2004 dalam Idhamsya, 2011:50).

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen* ( $Y$ ). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel *dependen* (terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi).

F-hitung dapat dicari dengan bentuk formulasi rumus menurut Priyatno (2009:81) sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana:

$F$  = Dari tabel distribusi F

$R^2$  = Koefisien determinasi

$k$  = Jumlah variabel *independen*

$n$  = Jumlah data atau kasus

Adapun kaidah pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah:

a. Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) atau  $P = 95\%$

maka dapat dibuktikan variabel *independen* (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Modal) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) atau  $P = 95\%$  maka dapat dibuktikan variabel *independen* (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Modal) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel *independen* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* ( $Y$ ). Rumus t-hitung pada analisis regresi menurut Priyatno (2009:83) diformulasikan dengan bentuk persamaan matematis sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana:

$t$  = Diperoleh dari daftar tabel distribusi t

$b_i$  = Koefisien regresi variabel  $i$

$S_{b_i}$  = Standar *error* variabel  $i$

Adapun kaidah pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah:

a. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti secara parsial variabel *independen*/bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Modal) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti

secara parsial variabel *independen*/bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Modal) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### 1.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Metode Regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan

LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH terhadap LnBM dengan melihat kekuatan hubungan antar LnBM dengan LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH. Model regresi linier berganda tersebut adalah:

$$\text{LnBM} = a + b_1\text{LnPAD} + b_2\text{LnDAU} + b_3\text{LnDAK} + b_4\text{LnDBH} + e$$

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dengan rincian hasil diformulasikan dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Setelah Ln Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.065	3.928		1.289	.203
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.033	.059	.086	.561	.577
	Dana Alokasi Umum (DAU)	.375	.210	.335	1.786	.080
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	.308	.144	.297	2.143	.037
	Dana Bagi Hasil (DBH)	.089	.094	.106	.951	.346

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Lampiran 3.

Sesuai Tabel 1 di atas, maka dapat disusun model persamaan Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:  

$$\text{LnY} = 5,065 + 0,033 X_1 + 0,375 X_2 + 0,308 X_3 + 0,089 X_4 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang dianalisis terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui nilai koefisien determinasi ganda (*R-Squared*) sebesar 0,446. Hal ini memberikan makna bahwa 44,6% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel *independen* yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan 55,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model penelitian.

Kemudian besarnya hubungan variabel *independen* (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi (*Multiple-R*) sebesar 0,668. Nilai ini memberikan makna bahwa hubungan (korelasi), keempat variabel *independen* yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dalam penelitian

ini sebesar 66,8% terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

## 1.2. Hasil Pengujian Hipotesis

### a. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menguji hipotesis pertama penelitian digunakan nilai uji-F untuk mengetahui sejauhmana variabel-variabel *independen* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 10,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha 0,05$ ) dan F-hitung sebesar  $10,063 > F\text{-tabel}$  sebesar 1,53 yang artinya  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , artinya hipotesis pertama penelitian secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya.

### b. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada nilai uji-t.

Nilai t-hitung variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,561 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,011 atau nilai signifikansinya sebesar 0,577 lebih besar dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat

kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan (bermakna), terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) sebesar 1,786 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,011 atau nilai signifikansinya sebesar 0,080 lebih besar dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan (bermakna), terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) sebesar 2,143 lebih besar dari nilai t-tabel 2,011 atau nilai signifikannya sebesar 0,037 lebih kecil dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) sebesar 0,951 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,011 atau nilai signifikannya sebesar 0,346 lebih besar dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ , artinya hipotesis kedua penelitian secara ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak semua variabel *independen* penelitian (PAD, DAU, DAK dan DBH) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.



## 2. Pembahasan

### 2.1. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sheila Ardhan Nuarisa (2013) dan Asrul Wisnu Setiawan (2015) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel *independen* dimana DAU, DAK dan DBH termasuk didalam indikator dana perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama terhadap belanja modal adalah sebesar 52,1% berarti sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

### 2.2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD

lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal.

### 2.3. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal dengan arah positif. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU lebih digunakan untuk membiayai belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku *opportunistik*. Hal ini karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih sedangkan pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya karena memiliki keunggulan kekuasaan.

Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja operasi daripada belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal dengan arah positif. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan jika semakin tinggi DAU maka proporsi untuk alokasi belanja modal akan semakin berkurang, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa

perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU.

#### **2.4. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK

meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sheila Ardhan Nuarisa (2013), Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra (2014) dan Asrul Wisnu Setiawan (2015) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

#### **2.5. Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang semakin berkurang. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pemerintah pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah kurang dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) secara maksimal untuk dapat meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran

DBH meningkat maka alokasi belanja modal belum tentu mengalami peningkatan pula. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asrul Wisnu Setiawan (2015) memberikan hasil penelitian yang tidak sama dengan penelitian ini, yaitu DBH berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

### Rekomendasi

1. Melihat adanya fenomena tidak signifikannya pengaruh PAD terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih mengoptimalkan lagi penggalan sumber-sumberdaya alam yang potensial memberikan kontribusi pada PAD kabupaten/kota.
2. Melihat pengaruh DAU, DAK dan DBH sangat signifikan terhadap belanja modal maka sebaiknya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah lebih meningkatkan anggaran DAU, DAK dan DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel

*independen* lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E.,M.Si., selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Dr. Abdul Kahar, S.E.,Ak., M.Si., selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asrul Wisnu Setiawan. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode Tahun 2007-2013, *Tesis* tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makassar 26-28 Juli 2007.
- Halim, Purnomo. 2009. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Idhamsya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah,

- Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ni Luh Dina Selvia Martini, Wayan Cipta, I Wayan Suwendra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Volume 2 Tahun 2014.
- Pratiwi, Maulida Novi. 2007. Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwi. 2009. *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, Media Kom. Yogyakarta.
- Purnamawati, Erlis. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatera, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.5 No.2, hal.68-84, ISSN:1858-3687. Diakses Tanggal 09 Maret 2016.
- Puspita Sari. 2010. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol.1, No.2, Juli 2010, hal.185-202. Diakses Tanggal 10 Maret 2016.
- Subaygo, Siswantoro. 2003. Pengaruh DAU, PAD, SILPA dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta: hal.33-40 (Diakses Tanggal 09 Maret 2016).
- Yovita, Farah Marta, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010), *Diponegoro Journal Accounting*. Universitas Diponegoro. Semarang.